



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA KELEMBAGAAN DAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PERGURUAN
TINGGI (KAP PT) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: 1. Badan Akreditasi Nasional PT; 2. Rektor Universitas Padjajaran 3. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November 4. Rektor Universitas Jenderal Soedirman 5. Rektor Universitas Mulawarman
Hari/Tanggal	: Senin, 11 Maret 2018
Pukul	: 11.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: DR. Djoko Udjiyanto, MM./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./Kabag. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Capaian, Permasalahan, Evaluasi, dan Rekomendasi Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 2. Kebutuhan Anggaran dan SDM BAN PT 3. Peran BAN PT dalam Pembentukan LAM PT 4. Pola Koordinasi BAN PT dengan Kemenristekdikti RI 5. Permasalahan Akreditasi PT dan Prodi di PTN BH dan PTN BLU
Hadir Anggota Panja	: 18 orang dari 30 Anggota Panja Kelembagaan dan Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.
Hadir Undangan	: 1. Prof. Ir. Dwiwahju Sasongko, Msc. PhD, Ketua Majelis Akreditasi BAN PT 2. Prof. Mansyur Ramly, anggota Majelis Akreditasi BAN-PT 3. DR. Agus Setiabudi, MSi, Sekretaris Dewan Eksekutif BAN PT 4. Prof. DR. med. Tri Hanggono Achmad, dr. Rektor Universitas Padjajaran 5. Prof. Ir. Joni Hermana, M.ScES., PhD, Rektor Institut Teknologi Sepuluh November. 6. Prof. DR. H. Masjaya, MSi, Rektor Universitas Mulawarman

7. Prof. Dr. Suwanto, MSi, Rektor Universitas Jenderal Soedirman

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja KAP PT Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11:20 WIB oleh **DR. Djoko Udjiyanto, MM./Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari anggota Badan Akreditasi Nasional PT, Perwakilan PTN BH dan PTN BLU serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja KAP PT Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN

A. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

BAN-PT menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Capaian BAN-PT 2016-2018

- a. Perumusan Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (2017).
- b. Penerapan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- c. Penetapan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 (IAPT 3.0).
- d. Pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 (IAPS 4.0).

Perkembangan Akreditasi PT

Peringkat	31 Desember 2016		31 Desember 2017		31 Desember 2018	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
A	48	4%	65	4%	85	4%
B	336	30%	531	34%	725	37%
C	733	66%	954	62%	1.164	59%
Total	1.117	100%	1.549	100%	1.974	100%

Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi PT 2018

Penyelenggara	Peringkat			
	A	B	C	Total
PTN	40	46	5	91
PTS	36	549	879	1464
PTAN	4	44	20	68
PTAS		29	256	285
PTKL	5	57	4	66
Jumlah	85	725	1164	1974

Capaian Akreditasi Program Studi

Peringkat	31 Desember 2016		31 Desember 2017		31 Desember 2018	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
A	2.369	12%	2.823	15%	3.471	17%

B	8.875	46%	10.323	53%	11.107	56%
C	7.849	41%	6.171	32%	5.273	27%
Total	19.093	100%	19.317	100%	19.851	100%

2. Permasalahan Akreditasi:
 - a. Ketimpangan antara beban akreditasi dengan alokasi anggaran.
 - b. Ketimpangan antara sistem pengelolaan keuangan (berbasis konvensional) dengan proses akreditasi (berbasis online).
 - c. Perguruan tinggi belum sepenuhnya memahami pentingnya akreditasi sebagai bagian dari peningkatan mutu, dan mengalami berbagai hambatan dalam proses akreditasi.
 - d. Ketersediaan, sebaran dan kompetensi asesor masih dipandang kurang
 - e. Status kelembagaan Sekretariat BAN-PT.

3. Kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia:
 - a. Alokasi anggaran tahun 2019 Rp130 M dengan target 3200 Program Studi dan 600 Perguruan Tinggi.
 - b. Usulan target menjadi 4000 Program Studi dan 1000 Perguruan Tinggi, kekurangan anggaran diusulkan sementara Rp 36,3 M.
 - c. Belum adanya satuan biaya masukan lainnya untuk proses akreditasi dari Kemenkeu RI
 - d. Sekretariat BAN-PT sebagai Satker setara unit eselon II (dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti).
 - e. Sekretariat dipimpin pejabat struktural.
 - f. Staf sekretariat tetap dengan status ASN dengan posisi (dan kapasitas) *QA officers*, Manajer, Staf teknologi informasi, administrasi proses akreditasi, administrasi umum, dan administrasi keuangan.

4. Terkait Peran BAN-PT dalam Pembentukan LAM PT diatur melalui Permenristekdikti 32/2016 Majelis Akreditasi BAN-PT bertugas dan memiliki kewenangan antara lain:
 - a. menetapkan instrument akreditasi Prodi atas usul LAM.
 - b. memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri.
 - c. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM.

Sementara Dewan Eksekutif BAN-PT bertugas dan memiliki kewenangan antara lain:

 - a. menerima dan menyampaikan usul instrumen akreditasi Prodi dari LAM kepada Majelis Akreditasi.
 - b. menyampaikan rekomendasi pendirian dan pencabutan pengakuan LAM kepada Menteri.

5. Pola hubungan dengan Kemenristekdikti RI sebagai berikut:
 - a. Akreditasi Program Studi dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

- b. Akreditasi Perguruan Tinggi dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi.
- c. Sekretariat Pendukung dan Keuangan dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi
- d. Hal-hal tertentu dengan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Direktorat Jenderal, serta Kementerian/Lembaga yang lain.

B. Universitas Padjajaran

Terkait dengan permasalahan akreditasi perguruan tinggi dan program studi, Unpad menyampaikan antara lain:

- a. Disparitas mutu sistem pendidikan di Indonesia sangat beragam dan banyak hal yang sangat berbeda kultur dan kondisi prodi sehingga dengan satu standar yang sama dapat menghambat pengembangan program studi yang ada di daerah terpencil atau wilayah yang belum maju.
- b. Sistem akreditasi belum berbasis ISO 9001:2015, sepertinya masih berbasis ISO 9001: 2008 sehingga fokusnya harus ada SOP, padahal dalam perguruan tinggi/fakultas yang sudah menggunakan ISO 9001:2015 dasarnya adalah ada data dan informasi sudah menjadi landasan dalam pelaksanaan program.

C. Institut Teknologi Sepuluh November

Terkait dengan permasalahan akreditasi perguruan tinggi dan program studi, ITS menyampaikan antara lain:

- a. Perlunya sinkronisasi data pada PD Dikti dan BAN-PT untuk reakreditasi Prodi.
- b. Perlunya perbaikan sistem di SILEMKERMA – DIKTI untuk membedakan sistem bagi PTN-BH, PTN, dan PTS pada pembukaan Prodi baru.
- c. Kejelasan prosedur pembukaan Prodi baru di PTN-BH baik melalui sistem online maupun manual. Serta perlunya sosialisasi prosedur tersebut dari tingkat bawah sampai pimpinan.
- d. BAN-PT harus akomodatif terhadap perubahan yang terjadi. Kalau ada perubahan nama Prodi di PD Dikti, BAN-PT harus mengikuti tanpa PT mengajukan permohonan perubahan nama kepada BAN-PT.
- e. BAN-PT segera melakukan *desk evaluation* dan visitasi terhadap Prodi yang mengajukan reakreditasi setelah semua berkas terpenuhi untuk meminimalisir keterlambatan akreditasi.
- f. Menambahkan kriteria penilaian kurikulum berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan Industri 4.0.

D. Universitas Mulawarman

Terkait dengan permasalahan akreditasi perguruan tinggi dan program studi, Unmul menyampaikan antara lain:

- a. Berdasarkan pengalaman Unmul mendapatkan kesempatan untuk menjadi Perguruan Tinggi Asuh terhadap 7 PTS (dengan 21 Prodi) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, maka dengan bimbingan teknis (pembinaan, pendampingan dan pengawasan) telah mampu meningkatkan kualitas Prodi.

- b. Berdasarkan butir a di atas dan dengan Perkembangan peningkatan dari 7 Standar ke 9 Kriteria, maka BAN PT perlu mempertimbangkan bahwa penilaian “Keunggulan” PT perlu ada pengelompokan, dengan contoh tertinggi Akreditasi “A” dengan penggunaan 7 (atau kurang) dan 9 Kriteria. Sehingga ada motivasi tinggi dari PTS.
- c. Mengkhawatirkan (meskipun disadari pentingnya penyempurnaan standar) dengan penambahan dari 7 ke 9 standar serta tanpa pendampingan yang memadai, jumlah PT yang mampu mencapai Akreditasi A “Unggul” bisa berkurang, akibat beberapa PT tidak/belum siap untuk melaksanakan.
- d. BAN PT memberikan kesempatan bagi asesor yang berasal dari Perguruan Tinggi dengan Akreditasi A walaupun Prodi nya masih berakreditasi B di luar pulau Jawa.

E. Universitas Jenderal Soedirman

Terkait dengan permasalahan akreditasi perguruan tinggi dan program studi, Unsoed menyampaikan antara lain:

- a. Mengingat kekhasan masing masing bentuk pengelolaan perguruan tinggi, maka penyelesaian yang dilakukan tidak mungkin disamaratakan. Pemerintah harus terus meningkatkan pembinaan PT terkait dengan peningkatan kesehatan organisasi dan *governance* PT, serta peningkatan kemampuan PT untuk berkompetisi dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- b. Pemerintah bersama dengan DPR seyogyanya mencari upaya untuk melepaskan “belenggu” kekakuan aturan terutama terkait dengan keuangan negara yang cenderung administratif.
- c. Data hasil akreditasi PT dan Prodi yang dikeluarkan oleh BAN-PT sebaiknya dapat digunakan sebagai pijakan kebijakan yang akan dikeluarkan.

F. Panja KAP PT Komisi X DPR RI

Panja KAP PT Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap paparan dan masukan BAN PT, Unpad dan ITS sebagai perwakilan PTN BH, dan Unmul serta Unsoed perwakilan PTN BLU sebagai bagian referensi laporan dan rekomendasi Panja KAP PT Komisi X DPR RI kepada Pemerintah, dan apabila masih ingin melengkapi diharapkan memberikannya secara tertulis.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB